

**PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK
RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (DP2KAD) KABUPATEN KAYONG UTARA**

Beni Arya Dwinanto

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : beni_aryadwinanto@yahoo.com

Abstrak

BENI ARYA DWINANTO (E.42009069) : Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 tahun 2010 tentang Pajak Restora di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara. **Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara. Melalui uji statistik regresi linier sederhana dengan menggunakan jumlah populasi yang ada yaitu berjumlah 33 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada koefisien korelasi (R) sebesar 0,757 dan persamaan regresi $Y = 2,729 + 0,554X$. Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator pada penelitian ini bersifat valid dan reliabel. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa uji diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $(41,493) > F_{tabel} (4,17)$ dengan nilai probabilitas = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti sumber daya berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Kata Kunci : Sumber daya dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 tahun 2010 tentang Pajak Restoran

Abstrac

BENI ARYA DWINANT (E.42009069) : *Resources Influence to Implementation of Law of Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration On Earnings, Monetary Management and Asset of Area of Kayong Utara Regency Agency Services. Skripsi. Pontianak : Public Administration Science Study of Governmental Cooperation between Tanjungpura University with West Kalimantan Government. This research target is to know and analyse the Resouerce influence to Implementation of Law of Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration On Earnings, Monetary Management and Asset of rea of Kayong Utara Regency Agency Services. Th ough statistical test of simple linear regression by using existing population amount by 33 people. Result of research indicates that there is correlation coefficient (R) equal to 0,757 and equation of regresi $Y = 2,729 + 0,554 X$. Pursuant to statistical analysis, indicators of this research have the characters of valid and reliable. Hypothesis result indicates that the test F obtained from F_{count} equal to $(41,493) > F_{table} (4,17)$ with the probability values = 0,000 smaller than probability values 0,05 which is means H_a accepted and H_o refused. Matter of this Resources have an significantly effect to effectiveness of Implementation of Law of Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration.*

Key Words: Resources and Implementation of Law of Kayong Utara Regency of Number 23 year 2010 about Tax Restoration.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan. Sumber Pajak Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu tolak ukur besarnya pendapatan / penerimaan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah dijadikan indikator kesiapan Pemerintah Daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan Pajak Daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan akan kemampuan tersebut diharapkan bersumber dari kemampuan mampu menyiasati penerimaan Pajak Daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Kabupaten Kayong Utara, sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan seperti maupun perangkat pelaksanaannya. Apabila dilihat dari segi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kayong Utara dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah, masih mengalami kendala khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Restoran. Hal ini dapat dilihat dari belum dapat terserapnya setiap anggaran yang telah ditetapkan disetiap tahun anggarannya, berkenaan

dengan hal tersebut berikut akan disajikan tabel Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di DP2KAD Kabupaten Kayong Utara:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
di DP2KAD Kabupaten Kayong Utara

No	PAD	TH	PAGUDPA	REALISASI	Target Yang Belum Tercapai	Persentase
1	Pajak Restoran	2011	32.760.000	9.875.800	22.884.200	30,5%
2	Pajak Restoran	2012	646.710.377	327.705.188	319.005.188	50%

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti Tahun 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi Penerimaan Pajak Restoran penyerapannya setiap tahun masih belum optimal hal ini dapat terlihat dari masih jauhnya realisasi dari target yang telah ditetapkan oleh DP2KAD. Terlihat pada tahun 2011 dari pagu yang telah ditetapkan dalam DPA sebesar 32.760.000 yang dapat terealisasi hanya sebesar 30,5%, dan pada tahun 2012 kemampuan mencapai target juga masih belum mengalami kenaikan yang signifikan hal ini terlihat dari target yang hanya mampu tercapai sebesar 50% saja.

Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup besar untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Restoran mengingat semakin banyaknya usaha rumah makan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Namun kenyataan pajak tersebut selama ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan dan cenderung belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara. Sebagai sampel peneliti mengambil data wajib pajak restoran di tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak Restoran / Rumah Makan
di Kabupaten Kayong Utara

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Makan		Keterangan
		2011	2012	
1	Sukadana	36	40	Bertambah
2	Simpang hilir	11	13	Bertambah
3	Teluk Batang	9	10	Bertambah

Sumber: DP2KAD Bagian Pendapatan Kab. Kayong Utara

Dari tabel diatas terlihat bahwa rumah makan yang ada di tiap-tiap kecamatan mengalami penambahan setiap tahunnya dan peningkatan yang paling besar terjadi di Kecamatan Sukadana.

Peningkatan yang terjadi di Kecamatan Sukadana terjadi karena di kecamatan inilah pusat pemerintahan berada dimana pada hari-hari kerja tentunya banyak pegawai kantor yang melakukan makan bersama di rumah-rumah makan pada jam kerja dan hal ini yang mendorong usaha rumah makan bertambah setiap tahunnya di kecamatan ini selain itu juga di kecamatan inilah pusat pariwisata berada dimana terdapat obyek wisata pantai dan pegunungan yang setiap pekannya selalu diserbu oleh wisatawan.

Selain fenomena diatas masih terdapat juga beberapa permasalahan yang ada di DP2KAD berdasarkan hasil observasi dan wawancara peniliti diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah staf atau pegawai yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya seperti misalnya pegawai pemungut Pajak Restoran di Bagian Pendapatan yang hanya berjumlah 2 (dua) orang dan harus memungut pajak restoran di empat Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara yaitu Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Kayong Utara dan Kecamatan Simpang Hilir. Terlebih pegawai yang diberikan wewenang juga belum berstatus pegawai negeri sipil dan masih banyak yang masih pegawai tidak tetap.

- b. Pegawai yang diberikan wewenang terkadang masih belum mengetahui cara melaksanakan kebijakan yang diberikan dan tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Terlebih terkadang data yang diberikan oleh pegawai terkait kepatuhan pelaksana kebijakan juga belum sesuai peraturan yang ditetapkan.
- c. Berhubungan dengan wewenang, biasanya pegawai dalam melaksanakan kebijakan terkadang tidak suka menggunakan cara formal, cara informal biasanya ditempuh karena mereka beranggapan lebih cepat dan formalitasnya dapat menyusul.
- d. Sarana dan prasarana penunjang yang masih rendah karena petugas pemungut pajak restoran yang berjumlah 2 (dua) orang hanya menggunakan 1 (satu) buah kendaraan bermotor dan itu merupakan kendaran pribadi dari salah satu pegawai pemungut pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Pajak restoran dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak sehingga Pajak Restoran dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pajak Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

Perkembangan Kabupaten Kayong Utara yang merupakan kabupaten yang baru mekar dan telah menarik banyak investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Kayong Utara menuntut Pemerintah Daerah untuk bertindak lebih peka melihat perubahan yang terjadi terlebih potensi pariwisata besaryang dimiliki Kabupaten Kayong Utara dan perkembangan pariwisata yang semakin baik telah mendatangkan banyak kunjungan wisatawan ke daerah Kabupaten Kayong Utara dan hal ini diikuti dengan semakin banyaknya usaha Rumah Makan yang dibuka oleh masyarakat.

Perlu adanya perhatian Pemerintah dari sektor pajak ini menginggit pajak merupakan iuran dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang kepentingannya adalah untuk pembangunan daerah itu sendiri, tanpa kesiapan, kesigapan dan peran serta dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat maka tidak akan dapat terwujud pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Kayong Utara.

Dari uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Kayong Utara”.

Pembatasan Permasalahan

Karena faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sangat banyak dan luas, seperti apa yang diungkapkan George C. Edward III yang mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi. Maka peneliti membatasinya pada pengaruh sumber daya terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Perumusan Permasalahan

Atas dasar Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka peneliti mengambil perumusan masalah sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara?

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber

Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan khususnya pengaruh sumber daya terhadap implementasi kebijakan.

Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset beserta staf;
- b. Bagi peneliti, manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan, sesuai dengan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2007:174) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Lebih lanjut Edward III (dalam Agustino, 2008:149) mengungkapkan terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

daya terhadap implementasi Peraturan Daerah

Menurut Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:106-110) terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Akses

Dalam hal ini akses mengandung pengertian bahwa dan orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan.

2. Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangka oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

3. Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program.

4. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran kebijakan.

5. Service delivery (ketepatan layanan)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Dalam penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan peneliti menggunakan teori dari George C. Edward III dengan variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, isposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan untuk teori indikator dari implementasi kebijakan, peneliti hanya menggunakan 3 indikator dari teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:106-110) yaitu akses, cakupan dan frekuensi, hal ini mengingat seperti frekuensi dan service delivery (ketepatan layanan) yang memiliki kesamaan dalam hal waktu sehingga peneliti memilih salah satu diantaranya.

Menurut Edwar III (dalam Widodo,2008:98) terkait sumber daya menegaskan bahwa "Bagaimanapun jelas dan konsistensya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif".

Variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Lebih lanjut menurut George C.

implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

6. Akuntabilitas

disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya;

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan;
- c. Wewenang; pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan;
- d. Fasilitas; tanpa ada fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Sumber daya adalah salah satu hal yang harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Edward III (dalam Agustino, 2006:86) yang menyatakan bahwa:

“Salah satu hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah terpenuhinya *resource*. *Resource* dalam hal ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya berkenaan dengan sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas, maka diharapkan kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai tujuan dan

Edward III (dalam Agustino, 2008:151)

indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya

prasarana yang baik maka diharapkan akan mempermudah pengimplementasian suatu kebijakan tersebut. Oleh karena itu terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara ketersediaan sumber daya dan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksplanasi asosiatif/hubungan kausal. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai DP2KAD Kabupaten Kayong Utara yang berjumlah 33 pegawai dan seluruhnya dijadikan sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan angket/kuesioner dengan skala Likert, dokumentasi, dan wawancara.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil deskripsi variabel sumber daya, tanggapan responden mengenai sumber daya sebanyak 5 orang (15,2%) menyatakan baik, 11 orang (33,3%) menyatakan kurang baik, dan sebanyak 17 orang (51,5%) menyatakan tidak baik. Dari hasil perhitungan, nilai rata-rata dari sumber daya yaitu sebesar 33,33. Dari hal tersebut diketahui bahwa sumber daya di Dinas Pendapatan,

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Seperti telah disampaikan dalam teori di atas bahwa sumber daya atau *resource* merupakan salah satu Pengelolaan, Keuangan Kabupaten Kayong Utara kurang baik.

Aset Daerah masuk dalam kategori satu yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam

maupun kualitas dan sumber daya pendukung lain seperti terpenuhinya fasilitas berupa sarana dan

perhitungan, nilai rata-rata dari implementasi kebijakan publik yaitu sebesar 33,33. Dari hal tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan publik di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara masuk dalam kategori Kurang baik.

Variabel sumber daya memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap implementasi kebijakan publik di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara. Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi sebesar 0,757 lebih besar daripada nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

Meskipun demikian, variabel sumber daya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik hanya sebesar 57,2%, yang diperoleh dari hasil perhitungan koefisien determinasi. Sedangkan 42,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

D. KESIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji F , F_{hitung} dibandingkan F_{tabel} dan berdasarkan

mengimplementasikan suatu kebijakan. Dengan terpenuhinya sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia atau pegawai baik dari segi kuantitas kebijakan publik, tanggapan responden mengenai implementasi kebijakan publik sebanyak 6 orang (18,2%) menyatakan baik, Hasil deskripsi variabel implementasi 21 orang (63,6%)

menyatakan kurang baik, dan sebanyak 6 orang (18,2%) menyatakan tidak baik. Dari hasil

66,7% menyatakan staf yang tersedia masih kurang baik, kemudian informasi yang tersedia menyatakan bahwa 48,5% menyatakan tidak baik dan wewenang yang telah diberikan juga belum mampu dilaksanakan dengan baik yaitu sekitar 57,6% dan terakhir terkait fasilitas sebesar 75,8% menyatakan fasilitas yang tersedia adalah tidak baik.

b. Variabel implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran merupakan variabel terikat yang dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya frekuensi tanggapan responden yang menyatakan kurang baik dari tiap-tiap indikator implementasi tersebut seperti indikator akses dimana jawaban responden sekitar 66,7% menjawab kurang baik, sedangkan indikator cakupan responden menjawab sekitar 48,5% tidak baik dan indikator frekuensi sebesar 54,5% menyatakan kurang baik.

c. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien dari persamaan

analisis data yang dilakukan diperoleh nilai F_{hitung} (41,493) dan nilai signifikan lebih kecil regresi adalah positif dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,000 < 0,005$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu hipotesis peneliti dalam hal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Peraturan Daerah

2. Implikasi

a. Variabel sumber daya sebagai variabel bebas dikategorikan secara umum adalah tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari staf dimana penelitian ini dimana teori Edward III menyatakan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dilihat dari hasil penelitian ini dimana memang terdapat pengaruh sumber daya terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di DP2KAD Kabupaten Kayong Utara sehingga teori tersebut terbukti dan relevan sehingga bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut untuk sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Dilihat dari manfaat praktisnya, penelitian ini memberikan su bangan pemikiran dan pertimbangan bagi inst nsi terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran tersebut dimana hasil penelitian yaitu sumber daya mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

terbukti dan diterima. Sehingga berdasarkan teori Edward III yang dijadikan dasar peneliti Nomor 23 Tahun Restoran. 2010 tentang Pajak dalam melakukan penelitian ini membuktikan 2) Besarnya pengaruh antara variabel X bahwa teori ini masih berlaku dan telah terbukti bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya. Berikut kesimpulan secara umumnya:

terhadap variabel Y adalah sebesar 57,2% dan 42,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam

kuantitas dari sumber daya tersebut agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat lebih baik.

b. Terkait dengan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran oleh pegawai DP2KAD maka disarankan agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat lebih ditingkatkan, misalnya memberikan kemudahan akses informasi bagi wajib pajak dan orang-orang yang membutuhkan informasi terkait DP2KAD, contohnya memberikan kesadaran akan pentingnya pajak melalui pembuatan baliho dan lain-lain.

c. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 57,2% dan sisanya 42,8% dipengaruhi oleh faktor lain oleh karena itu diharapkan masih a a penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh mahasiswa lainnya

pada batas kategori kuat dan masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi yang belum untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor lainnya tersebut.

diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu,
4. Keterbatasan Penelitian

diharapkan ada penelitian lanjutan yang bisa dilakukan oleh instansi maupun pihak lain yang tertarik untuk meneliti faktor lain yang

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini hanya memfokuskan pada faktor sumber daya yang berpengaruh pada

mempengaruhi tersebut sehingga implementasi

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

b. DP2KAD maupun Pemda Kabupaten

Kayong Utara untuk lebih memperhatikan dan dapat meningkatkan kualitas dan keterbatasan

Edward III masih ada faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya disposisi, struktur birokrasi dan

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah komunikasi. Selain itu menunjukkan variabel X juga hasil penelitian sumber daya hanya dilakukan, berikut akan diajukan beberapa saran dan semoga berguna dalam rangka perbaikan hal tersebut diatas:

mempengaruhi variabel Y sebesar 57,2 % dan sisanya 42,8 % dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel X. Selain itu juga penulis

a. Mengingat sumber daya yang ada implementasi kebijakan sedangkan menurut teori masih merupakan seorang peneliti

pemula sehingga belum baik maka diharapkan kepada penelitian ini belum sebaik yang diharapkan.

tersebut penulis mengharap semoga penulis lain dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan



DAFTAR PUSTAKA

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Tanjungpura. Pontianak.

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ilyas, Wirawan B, Burton, Richard. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Otonomi Daerah*. Yogyakarta. *Dalam Transisi*
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kayong Utara.
- Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Setyawan, Setu, Suprpti, Eny. 2006. *Perpajakan*. Malang. Bayumedia Publishing dan UMM Press.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung. Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Peraturan Daerah:**
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- Skripsi:** Fitri Dwi Haryani. 2012. *Pengaruh Koordinasi terhadap Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara*. Fakultas Ilmu

Beni Arya Dwinanto

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BENI ARYA DWINANTO
NIM / Periode Iulus : E42009069 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : beni_aryadwinanto@yahoo.com / 081257562770

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK
RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (DP2KAD) KABUPATEN KAYONG UTARA

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....
KERJASAMA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 Februari 2014

(BENI ARYA DWINANTO)

